

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2014). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 22(1), 110–123.
- Andirani. (2012). *Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta*.
- Burhan, I., & Nurul Wahidah, N. (2020). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Ph Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2184>
- Hayani Ginting, R. M. (2018). Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Kawasan Industri Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 17–24.
- Husnaeda. (2019). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh (PASAL) 21 Pada Dosen FEBIS PTS UNISMUH Makassar*.
- Ilyas, W. B. (2011). Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art4>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Direktorat Jenderal Pajak Penghasilan 2*.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/Pmk.03/200. In *Society*.
- Lamonge, S. S., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. B. (2016). Evaluasi Penghitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. *Emba*, 4(3), 44–55.
- Malik, E. (2018). *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan*. 1(36), 1–9.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. In *PT. Remaja Rosda Karya*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Morissan. (2012). *Pengertian Populasi Menurut Para Ahli*. Dosen Pendidikan.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. (2016). *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016*.
- Purwono, H. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Amajon.
- Resmi, S. (2017). *Teori dan Kasus Perpajakan* (11th ed).
- Sari. (2017). *Pengaruh Kompetensi Pegawai Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak*

Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. 2, 361–378. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i2.89>

Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16*(01), 449–458.

Suandy. (2011). *Sistem Pemungutan Pajak Daerah. In Hukum Pajak (Vol. 3, pp. 231–232).*

Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 8*(2).

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian. CV Alfabeta.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Yaniawati. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (Liberary Research), April.*

Peraturan Dirjen Pajak, 2022. *Peraturan PER-03/PJ/2022, 28 November 2023.*

Peraturan Menteri Keuangan, 2022. *Nomor 18/PMK.03/2021, 26 Desember 2023.*

Kementerian Keuangan, Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /Pmk.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaann Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan , Pub. L. No. 177/PMK.03/2022 (2022).*